

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

The Effect of Financial Ratio on Capital Expenditure Allocations of Districts/Cities in West Java Province

Aulia Azzahra

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: aulia.azzahra.amp17@polban.ac.id

Sudradjat

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: sudrajat.ak@polban.ac.id

Abstract: *This research is done to show the ratio of financial on capital expenditures allocation in places around in West Java during 2014-2019. The ratios used are PAD effectiveness ratio, efficiency ratio, and financial dependency ratio. Financial performance is calculated using these financial ratios which will later be used as decision making in economic, political and social terms. Quantitative descriptive method is used for this research. Sampling technique in this research is using a nonprobability sampling with saturated sampling technique where the entire population is sampled, which is 27 districts and cities in West Java Province. The information we used is panel data and taken from the realization of revenues and expenditures report in several places around West Java Province. The analyzing data is using the multiple linear method by Eviews software regression..*

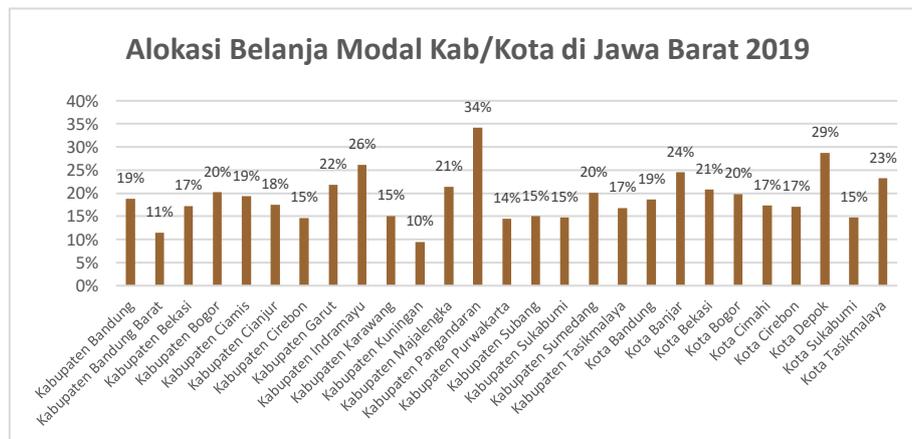
Keywords: Financial ratio, capital expenditure allocation

1. Pendahuluan

Realisasi APBD merupakan tujuan APBD dan menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dengan memperhitungkan kualitas kerja finansial yang berlaku dalam satu daerah ketika mengelola anggaran dan keuangan pemerintah daerah secara tertib dan tertib. Sesuai, efisien, efektif secara ekonomi, transparan dan akuntabel. Memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan kepentingan masyarakat (PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 4).

Cara untuk dapat melihat seberapa baik kualitas kerja finansial pemerintah adalah karena anggaran tersebut terserap dalam laporan realisasi anggaran sebagaimana telah disusun oleh pemerintah kota. Saumi (2019) menyatakan bahwa serapan belanja modal pemerintah provinsi secara keseluruhan hanya sebesar 17%, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan serapan belanja pegawai yang mencapai angka 26% lalu dalam APBD TA 2018, rasio serapan pada kabupaten/kota rata-rata sama yaitu sebesar 40% masih digunakan untuk belanja pegawai, 24% belanja barang dan jasa, 20% untuk belanja modal dan 18% untuk belanja lainnya, hal ini dapat menimbulkan kerugian publik di mana belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana serta fasilitas publik tidak direalisasikan secara optimal serta kinerja keuangan yang masih belum efektif.

Grafik 1-1 Alokasi Belanja Modal Kab/Kota di Jawa Barat 2019



Sumber: Hasil olah data

Dari informasi di atas, Kabupaten Kuningan menempati peringkat terendah dalam pengalokasian belanja modal tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 10%. RPJMD tahun 2018-2023 yang menyebutkan bahwa fokus kebijakan pengelolaan keuangan ke depannya adalah meningkatkan belanja modal dan berorientasi pada masyarakat juga porsinya yang diupayakan untuk meningkat, sedangkan pada tahun 2016 porsi belanja modal di Kabupaten Kuningan mencapai angka 14% dan menurun menjadi 10% pada tahun 2019. Dikutip dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019 disebutkan pula bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja, pengelolaan serta pelaksanaan belanja terutama dalam belanja modal yang tercermin dalam rendahnya realisasi terhadap target yang diharapkan, selain itu disebutkan bahwa pengelolaan belanja belum optimal tercermin dari alokasi belanja pegawai yang cukup tinggi dan alokasi belanja modal relatif rendah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Kinerja Keuangan

Dalam laporan fiskal pemerintah daerah, Anda dapat melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah untuk tahun anggaran di mana ia dikonsolidasikan. Kinerja keuangan dan kapasitas daerah merupakan metrik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mewujudkan otonomi daerah (Harim & Syam Kusufi 2012). Di sisi lain, Andriyani dkk (2020) menjelaskan bahwa kinerja merupakan metrik kinerja yang sangat penting untuk diukur. Dikutip dari Mahsun (2013), kinerja keuangan daerah ditentukan dengan sistem keuangan Pencapaian keuangan daerah dari hasil pekerjaan, termasuk pendapatan dan persediaan dana belanja daerah, dikatakan ditentukan oleh kebijakan: hal ini diperkuat oleh Sucipto (2005), yaitu diperkuat oleh Sucipto (2005) bahwa durasi anggaran sementara atau peraturan perundang-undangan.

2.2. Alat Pengukuran Kinerja Keuangan

2.2.1 Rasio Keuangan

Menurut Prasetya (2005:47) analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang membandingkan satu estimasi dengan estimasi lainnya dalam laporan keuangan yang sama, dan digunakan untuk menentukan hubungan serta menentukan kekuatan dan kelemahan suatu organisasi. Sementara itu Mahmudi (2010:90) menyatakan bahwa identifikasi perbandingan data keuangan adalah perbandingan dari isi hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang berguna untuk menginterpretasikan kinerja dari tiap periode. Rasio Keuangan yang digunakan dalam penelitian :

1. Rasio Efektivitas PAD

Perhitungan rasio efektivitas PAD ini akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu minimal $\geq 100\%$. Perbandingan efektivitas PAD dapat diukur dengan rumus (Mahmudi, 2019:141):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Perbandingan ini menunjukkan adanya perbandingan input dengan output pada organisasi sektor publik dalam daerah tersebut. Jika hasil perhitungan rasio ini menunjukkan angka di bawah 100% maka dapat dikatakan jika kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut sudah efisien kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Mahsun, 2013:187). Dihitung dengan rumus

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Ketergantungan Keuangan

Perbandingan ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan pendapatan pemerintah pusat pemerintah pusat dengan keseluruhan pendapatan dari daerah tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan cara (Mahmudi, 2019:140):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.3 Belanja Modal

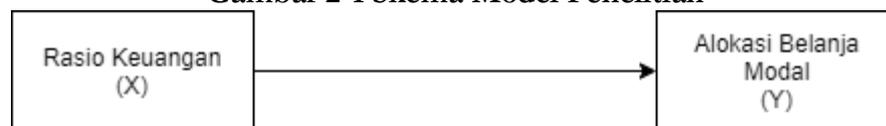
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, menyebutkan bahwa Belanja Modal merupakan outcome yang digunakan dalam rangka memenuhi kegiatan untuk memperoleh aset aset dalam ekonomi yang bermanfaat untuk pemerintah daerah itu sendiri selama satu periode, belanja modal ini terdiri dari perolehan atas bangunan baik itu berupa tanah maupun gedung, dan aset tak berwujud lainnya. Disebutkan juga bahwa terdapat batasan untuk porsi belanja modal, dimana belanja modal pada kabupaten diharapkan dapat mencapai 30% dari total belanja pemerintah. Berikut adalah cara perhitungan alokasi belanja modal dalam suatu daerah:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka penelitian ini perhitungan rasio-rasio keuangan didapatkan dari buku Mahmudi (2019) dan buku Mahsun (2013). Hasil perhitungan rasio keuangan akan menunjukkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan memiliki keterkaitan dengan penerimaan daerah di mana penerimaan daerah ini fungsinya adalah untuk dialokasikan pada belanja daerah seperti berikut:

Gambar 2-1 Skema Model Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : Rasio Keuangan berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019

H2 : Rasio Keuangan berupa Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019

H3 : Rasio Keuangan berupa Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019 penerimaan

3. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menghitung data keuangan yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Populasi pada penelitian yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, metode *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling* jenuh. Data dalam penelitian ini akan diambil dari panel dari 27 kab/kota di provinsi jawa barat dan kurun waktu 2014-2019 didapatkan dari laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah pada *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Alat analisis data yaitu menggunakan aplikasi Eviews. Dikutip dari pernyataan Basuki dan Prawoto (2016), ada 3 pendekatan dalam model regresi data panel diantaranya adalah common effect model, fixed effect model, dan random effect model.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari tahap ini adalah menjelaskan data yang sifatnya kuantitatif menjadi kualitatif agar lebih mudah dipahami. Variabel bebas yang diuji meliputi rasio efektivitas PAD (X1.1), rasio efisiensi (X1.2), dan rasio ketergantungan keuangan (X1.3). Sedangkan untuk variabel terikat yang diuji, yaitu alokasi belanja modal (Y) digunakan dalam enelitian ini.

Tabel. 4-1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Rasio Efektivitas PAD	159	0.21	3.36	1.11
Rasio Efisiensi	159	0.50	6.89	1.06
Rasio Ketergantungan Keuangan	159	0.05	0.81	0.55
Alokasi Belanja Modal	159	0.03	0.73	0.20

Dari Tabel IV-1, diketahui bahwa rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 1,11, artinya setiap kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki rata-rata efektivitas PAD sebanyak 1,11% per tahunnya selama 2014 – 2019. Rasio efisiensi memiliki rata-rata sebesar 1,06, artinya setiap kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki rata-rata efisiensi sebanyak 1,06% per tahunnya selama 2014 – 2019. Rasio ketergantungan keuangan memiliki rata-rata sebesar 0,55, artinya setiap kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki rata-rata efisiensi sebanyak 0,55% per tahunnya selama 2014 – 2019. Sedangkan untuk alokasi belanja modal memiliki rata-rata 0,20, artinya setiap kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki modal belanja daerah sebanyak 0,20% per tahunnya selama 2014-2019.

4.2 Analisis Regresi Data Panel

Dalam analisis ini, perlu digunakan beberapa uji dengan tujuan untuk memilih tipe regresi mana yang paling cocok untuk dimanfaatkan pada penelitian ini. Setelah melakukan kedua uji yang mana diantaranya adalah uji chow dan uji hausman. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dibawah ini:

$$ABM = 0.375864 + 0.025118*REPAD - 0.032272*RE - 0.313324RKK + \epsilon$$

- a. Nilai konstanta sebesar 0.375864 memberikan arti bahwa perbandingan keuangan yang dihitung dengan metode perbandingan efektivitas PAD, perbandingan efisiensi, dan rasio ketergantungan keuangan dengan angka 0 atau tetap, nilai alokasi variabel akan berpotensi menjadi sebesar 37,58%.
- b. Koefisien regresi variabel X1.1 atau perbandingan efektivitas PAD dengan jumlah 0.025118 berarti tiap terjadi perkembangan rasio efektivitas PAD berjumlah satu satuan, maka sebanyak 2,51% akan ditambahkan dalam alokasi belanja modal dengan variabel independen lainnya bersifat tidak dinamis.
- c. Koefisien regresi variabel X1.2 atau rasio efisiensi sebesar -0.032272 berarti setiap adanya penambahan efisiensi sejumlah satu satuan, dampaknya akan menurunkan nilai alokasi belanja modal kurang lebih sekitar 3,22% dengan catatan bahwa variabel independen lainnya bersifat non dinamis.
- d. Koefisien regresi variabel X1.3 atau rasio ketergantungan keuangan sebesar -0.313324 berarti setiap penambahan efisiensi berjumlah satu satuan, dampaknya akan menurunkan nilai alokasi belanja modal sebesar 31,33% dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat non dinamis.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis akan diujikan dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil uji regresi data atau uji hipotesis dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4-2 Uji Regresi Data Panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.375864	0.037502	10.02254	0.0000
X1.1	0.025118	0.016508	1.521597	0.1301
X1.2	-0.032272	0.008711	-3.704596	0.0003
X1.3	-0.313324	0.057155	-5.481973	0.0000

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

- a. Nilai probabilitas dari variabel rasio efektivitas PAD memperlihatkan nilai yang lebih besar dari tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$ ($0.1301 > 0,05$). Hal ini menunjukkan jika H01 diterima, yang berarti bahwa rasio keuangan berupa rasio efektivitas PAD di Provinsi Jawa Barat tidak ada dampak ataupun pengaruhnya dalam alokasi belanja modal.
- b. Nilai probabilitas dari variabel rasio efisiensi memperlihatkan nilai yang lebih kecil dari tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$ ($0.0003 < 0,05$). Hal ini menunjukkan jika Ha2 diterima, yang berarti bahwa rasio keuangan berupa rasio efisiensi bagi Provinsi Jawa Barat memberi pengaruh dalam alokasi belanja modal.
- c. Nilai probabilitas dari variabel perbandingan ketergantungan finansial memperlihatkan angka yang kurang dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ ($0.000 < 0,05$). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ha3 diterima, yang berarti bahwa rasio keuangan berupa perbandingan ketergantungan finansial memberikan pengaruh.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Analisis signifikansi simultan akan dilakukan dengan tuju untuk menjelaskan bgaimana variabel yang digunakan secara bersamaan memiliki pengaruh pada variabel dependen.

Tabel 4-3 Uji Signifikansi

R-squared	0.230555	Mean dependent var	0.098018
Adjusted R-squared	0.215663	S.D. dependent var	0.063288
S.E. of regression	0.056164	Sum squared resid	0.488928
F-statistic	15.48132	Durbin-Watson stat	1.645996
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan nilai probability F statistic yaitu 0,000000 dan angka tersebut kurang dari ukuran keyakinan $\alpha = 5\%$ ($0.000000 < 0,05$). Artinya secara simultan, keseluruhan rasio ini mempengaruhi alokasi belanja modal

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji ini akan dilakukan dengan tujuan mengetahui serta menganalisis sejauh mana variabel dependen memiliki kemampuan model (Ghozali, 2013). Dari hasil pengujian diperoleh data Adjusted R-Square dengan angka 0.215663 atau 22%, hasil tersebut berarti keuangan modal belanja di daerah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh variabel rasio keuangan berupa perbandingan efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan rasio ketergantungan keuangan sebesar 22%.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Rasio Keuangan berupa Rasio Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil olah data uji signifikansi diperoleh hasil bahwa H_{a1} ditolak yang artinya rasio keuangan berupa rasio efektivitas PAD tidak memiliki keterkaitan ataupun dampak bagi alokasi belanja modal. Hasil ini ditunjukkan dengan hasil representasi rasio efektivitas PAD yang rata rata setiap kab/kotanya mencapai angka 100 hingga >100 namun alokasi belanja modal masih berada di angka yang rendah di bawah proporsi yang seharusnya sebesar 30%. Daerah di Jawa Barat yang memiliki kualitas efektivitas PAD yang baik salah satunya adalah Kabupaten Bogor dengan angka persentase sebesar 123%, hal ini menjadikan Kabupaten Bogor dinilai paling mampu dalam merealisasikan PAD yang direncanakan berdasarkan potensi daerah serta letak geografis dari Kabupaten Bogor yang memungkinkan adanya tempat wisata yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan PAD. Angka efektivitas PAD di Kabupaten Bogor tiap tahunnya tidak stabil namun masih di angka 100% yang artinya keseluruhan anggaran PAD tiap tahunnya dapat terealisasikan dengan efektif. Sedangkan daerah yang memiliki angka terendah yaitu Kabupaten Purwakarta dengan angka sebesar 67%, salah satu nya dikarenakan oleh permasalahan pembayaran pajak yang ternyata masih rendah. Hingga tahun 2018 masih ada sekitar 400 orang di Kabupaten Purwakarta yang belum membayar pajak hingga sudah mencapai jatuh tempo sebanyak tiga kali, selain itu terdapat perusahaan besar yang masih menunggak pajak hingga total tunggakan mencapai angka lebih dari dua ratus juta hingga tahun 2018 (Diskominfo Purwakarta, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Andriyani Dkk (2020) namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arsa & Setiawina (2015) dan Novita & Nurhasanah (2019).

4.4.2 Pengaruh Rasio Keuangan berupa Rasio Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil olah data uji signifikansi diperoleh hasil bahwa H_{a2} diterima. Hal ini ditunjukkan dari representasi angka rasio efisiensi yang mendapatkan angka rasio efisiensi paling tinggi yaitu Kota Bandung sebesar 225%, yang artinya daerah paling tidak efisien dalam mengelola keuangannya. Hal ini tidak semata-mata buruk, hal ini terjadi karena pada tahun 2016 Kota

Bandung mengalokasikan belanja modal dalam upaya mempercepat proyek pembangunan *flyover* serta jumlah nominal pengeluaran ini tidak sebanding dengan pendapatan yang didapatkan Kota Bandung pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 pun Belanja Daerah lebih difokuskan pada Belanja Modal yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan serta banjir di Kota Bandung dan dinilai bagus untuk kepentingan masyarakat yang akan menggunakan fasilitas ini. Namun diharapkan pengeluaran berupa Belanja Daerah minimalnya itu sama dengan proyeksi pendapatan daerah dan lebih baik lagi.

4.4.3 Pengaruh Rasio Keuangan berupa Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil olah data uji signifikansi diperoleh hasil bahwa H_0 diterima. Angka rata-rata ketergantungan keuangan paling tinggi yaitu Kabupaten Pangandaran dengan angka sebesar 71% dalam kurun waktu 6 tahun. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah otonom baru yang perencanaan pembangunannya memiliki perhatian khusus serta masih bergantung pada pemerintah pusat dan diharapkan Kabupaten Pangandaran dapat lebih berkembang dan mandiri dari kondisi sekarang ini. Besarnya dana transfer dari pemerintah pusat ini pun dimanfaatkan oleh Kabupaten Pangandaran untuk membangun lebih banyak potensi dari berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, sehingga diharapkan dapat berkembang serta menarik beragam aktivitas ekonomi lainnya dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ini, senadadengan penelitian yang dilaksanakan oleh Arsa & Setiawina (2015) dan Novita & Nurhasanah (2019) tetapi hasil dalam penelitian ini tidak elaras dengan penelitian oleh Marlianita & Saleh (2020)

5. Kesimpulan

Ukuran rasio keuangan yang mempengaruhi alokasi belanja modal secara signifikan adalah rasio efisiensi dan rasio ketergantungan keuangan sedangkan rasio efektivitas PAD tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa walaupun kemampuan pemerintah dalam penyerapan anggaran PAD dinilai tinggi, tetapi PAD tersebut tidak condong dialokasikan kembali untuk belanja modal, melainkan lebih dialokasikan ke kebutuhan belanja lainnya.

References

- Andriyani, N, dkk (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132-144. <https://online-journal.unja.ac.id/>
- Arsa, I. K., & Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104–112. <https://ojs.unud.ac.id/>
- Basuki, A.T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Dilengkapi aplikasi SPSS & Eviews) (1st ed). Rajawali Pers Jakarta
- Bolen, K. K., & Payamta. (2019). The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 129. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583>
- Fitri, V. K., Rasuli, M., & Silfi, A. (2014). Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah

- (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Universitas Diponegoro*.
- Halim, A., & Syam Kusufi, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Humas Provinsi Jawa Barat. (2018). *Delapan Prioritas Pembangunan Jawa Barat di 2019*.
<http://humas.jabarprov.go.id/delapan-prioritas-pembangunan-jawa-barat-di-2019/763>
[diakses 5 Januari 2021]
- Indramawan, D. (2018). The Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 23.
- Liantino, W. (2018). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Kantor Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta. *Benefit*, 1-20.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th ed.)*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (4th ed.)*. BPF E Yogyakarta.
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35. <https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>
- Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 426–443.
- Novita, I., & Nurhasanah, N. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017). 53(9), 1689–1699. <http://journal.ubpkarawang.ac.id>
- Praza, Eko Indra. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 4(1), 25-36. <https://online-journal.unja.ac.id/>
- Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 28-240.
- Saumi, A. (2019). Serapan APBD untuk belanja modal rendah, masyarakat dirugikan. *Alinea.Id*.
<https://www.alinea.id/bisnis/serapan-belanja-modal-apbd-rendah-masyarakat-dirugikan-b1Xr69pSd> [diakses 4 Januari 2021]
- Yuliawati, & Mustika, A. (2018). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Auto (DCSR) Dalam Mengukur kinerja Keuangan Pemerintah DAerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013-2017. *JETAP*, 1-13.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023